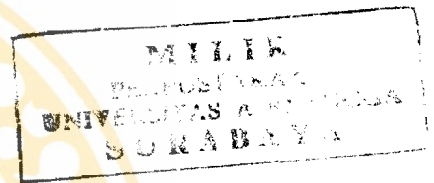
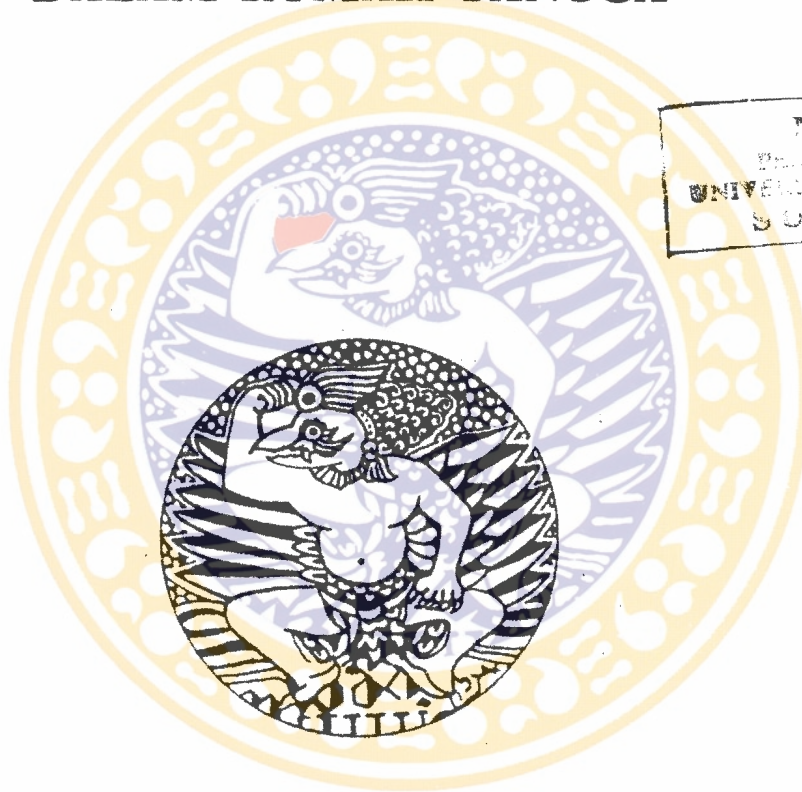


K
P
F
t

SKRIPSI

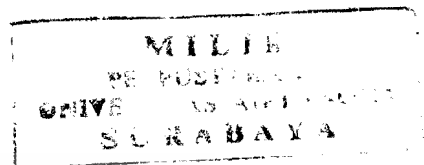
NUR FADILAH

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP HAK REPRODUKSI PEREMPUAN
DALAM RUMAH TANGGA**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2001**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP HAK REPRODUKSI PEREMPUAN
DALAM RUMAH TANGGA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN AKHIR
PROGRAM SARJANA BIDANG ILMU HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,

Lilik Kamilah, S.H., M.Hum.
NIP. 130531799

Nur Fadilah
NIM. 039614451

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada tanggal : 9 Januari 2001**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : H. M. Kobiran, S.H., M.S.

Anggota : 1. Lilik Kamilah, S.H., M.Hum.

2. Afdol, S.H., M.S.

3. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari semua uraian dan pembahasan sebelumnya tentang hak reproduksi perempuan, maka dapat disimpulkan :

- a. Hak reproduksi perempuan adalah hak yang menyangkut proses yang dilakukan perempuan dalam menjalankan fungsi reproduksi yang meliputi mengandung, melahirkan dan menyusui.
- b. Hak-hak yang termasuk reproduksi perempuan adalah :
 1. Hak untuk menikmati hubungan seksual, yakni selain sebagai *procreation* ternyata hubungan seksual dalam perkawinan juga bertujuan sebagai *pleasure / recreation* bagi kedua belah pihak (suami istri).
 2. Hak untuk menentukan kehamilan, yakni hak untuk menentukan kapan proses kehamilan itu diinginkan.
 3. Hak untuk menentukan jumlah kelahiran, yakni hak untuk menentukan berapa jumlah dan kapan kelahiran itu diinginkan.
- c. Pelaksanaan hak reproduksi perempuan, ternyata tidak seperti yang diharapkan (diajarkan) oleh Islam. Sepeninggal Nabi, konsep yang dikeluarkan oleh para ulama banyak dipengaruhi oleh budaya dan tradisi yang menyebabkan posisi perempuan kembali terpuruk nasibnya.

d. Tinjauan hukum Islam terhadap hak reproduksi perempuan :

1. Hak untuk menikmati hubungan seksual, ternyata tidak hanya sebagai hak suami saja, istri juga memiliki hak yang harus dipenuhi oleh suami karena pada dasarnya kedua belah pihak sama-sama sebagai subyek.
2. Hak untuk menentukan kehamilan, merupakan hak istri karena yang mengalami dan menanggung beban berat adalah istri, maka selayaknya istri diberi hak lebih dari suami dalam menentukan kehamilan.
3. Hak untuk menentukan keturunan, seharusnya diberikan kepada suami istri, pihak lain di luar keduanya tidak berhak mencampuri karena yang mengandung beban adanya keturunan adalah suami istri sendiri.

2. Saran

- a. Perlu disusun kembali fiqh yang lebih melindungi hak-hak kaum perempuan, karena fiqh yang selama ini adalah mengandung bias kelaki-lakian.
- b. Perlu dilakukan advokasi untuk mereformasi atau mengubah undang-undang atau melakukan penafsiran terhadap substansi hukum yang lebih berkeadilan gender.
- c. Dalam penyusunan kembali fiqh dan substansi hukum yang memiliki keadilan gender perlu mengikutsertakan kaum perempuan dalam pembahasannya, karena yang menyangkut masalah perempuan yang lebih tahu mendalam adalah kaum perempuan itu sendiri.

- d. Perlu diadakannya suatu bentuk penyuluhan dan konsultasi hukum terhadap perempuan pranikah tentang hak reproduksi perempuan dalam rumah tangga.

